

LAPORAN SEMINAR

“EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT”



Disusun oleh:

Nama : Luthfia Justisia Loebis, S.Kom.
NIP : 199606102025062004
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Satuan Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
Penguji : Ekki Rizki Ramadhan, S.Kom.

**PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
BALAI PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho-Nya Laporan Seminar dengan judul **“Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat”** telah selesai disusun. Laporan seminar ini merupakan tugas dari Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026 di Balai Pelatihan Hukum Jawa Tengah.

Dalam menyusun laporan seminar ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP, SH., M.Si., CGRE selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Bapak Jonny Pesta Simamora, S.IP, M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
3. Bapak Rinto Gunawan Sitorus, S.H., M.H. selaku Kepala Balai Pelatihan Hukum Jawa Tengah;
4. Bapak Ferry Indrawan, S.E., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
5. Orang tua dan keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan;
6. Teman-teman peserta Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026 yang telah saling mendukung dan membantu satu sama lain;
7. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan seminar ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga dengan selesainya laporan seminar ini, penulis dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada unit kerja penulis, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penulis menyadari bahwa laporan seminar ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan laporan evaluasi ini. Terakhir, penulis berharap laporan seminar ini dapat menjadi manfaat untuk semua pihak yang terlibat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. Waktu dan Tempat	3
B. Peserta.....	3
C. Materi Pelatihan	3
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE.....	4
A. Kondisi Saat Ini	4
B. Kondisi yang Diharapkan.....	4
C. Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>).....	5
BAB IV KESIMPULAN	7
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	8
BAB VI PENUTUP	10
LAMPIRAN	v

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Implementasi SPBE	5
Tabel 5.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SPBE	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat Tim Kerta Teknologi dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.....	v
Gambar 2. Pegawai Tim Kerja Teknologi dan Informasi mengikuti Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026.....	v
Gambar 3. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (I)	vi
Gambar 4. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (II).....	vi
Gambar 5. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (III)	vii
Gambar 6. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (IV)	vii
Gambar 7. Skrining Perangkat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (I)	viii
Gambar 8. Skrining Perangkat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menekankan integrasi sistem pelayanan publik pemerintahan. Implementasi SPBE secara terpadu didasari kebutuhan pemerintah agar menjadi transparansi dalam meningkatkan kepercayaan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan prinsip terintegrasi dan terpadu layanan di lingkungan Kementerian dan Lembaga lainnya, tidak terkecuali di Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Dalam penerapan SPBE ini, evaluasi SPBE merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa penerapan SPBE tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan aplikasi, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas proses bisnis, tata kelola pemerintahan, pengelolaan data, keamanan informasi, serta kualitas layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sebagai representasi Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari proses administrasi pemerintahan maupun pelayanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap implementasi SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat untuk mengetahui kondisi implementasi SPBE. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang tepat untuk penguatan tata kelola penerapan SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari kegiatan evaluasi implementasi SPBE ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan.

Tujuan

1. Mengidentifikasi kondisi implementasi SPBE saat ini;
2. Mengidentifikasi kondisi SPBE yang diharapkan;
3. Melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*);
4. Mengidentifikasi aspek SPBE yang perlu ditingkatkan;
5. Merumuskan rekomendasi perbaikan;
6. Menyusun rencana tindak lanjut implementasi SPBE.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan SPBE adalah pelaksanaan SPBE yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang mencakup :

1. Kebijakan SPBE;
2. Sumber Daya Manusia (SDM TI);
3. Infrastruktur SPBE;
4. Aplikasi SPBE;
5. Keamanan SPBE;
6. Manajemen SPBE; dan
7. Layanan SPBE.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 12 Agustus s.d 27 Agustus 2026

Tempat : *Zoom Meeting*

Metode : Pembelajaran Jarak Jauh

B. Peserta

Kegiatan pelatihan diikuti oleh 40 orang Pegawai yang berasal dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum pada Wilayah Kerja Balai Pelatihan Hukum Semarang (4 orang Pegawai dari Kantor Wilayah Kementean Hukum Kalimantan Barat) yang ditugaskan dalam pelaksanaan implementasi SPBE pada unit kerja masing-masing.

C. Materi Pelatihan

Materi pelatihan mencakup :

1. Kebijakan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum
2. Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi dan Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan SPBE
3. Ruang Lingkup dan Muatan pada SPBE
4. Manajemen Kompetensi SDM SPBE
5. Manajemen Pengetahuan SPBE
6. Manajemen Layanan SPBE
7. Manajemen Aset SPBE
8. Manajemen Data SPBE
9. Manajemen Perubahan SPBE
10. Manajemen Risiko SPBE
11. Manajemen Keamanan Informasi
12. Peta Rencana SPBE
13. Arsitektur SPBE

BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

A. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan hasil pelaksanaan SPBE sampai dengan saat ini, kondisi implementasi SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. SOP terkait SPBE telah tersedia untuk sejumlah layanan dan pengelolaan TIK, namun kepatuhan terhadap SOP belum sepenuhnya optimal;
2. Tersedia Tim TI yang terdiri atas 5 Pranata Komputer dan 1 Pengolah Data dan Informasi, namun kompetensi SPBE belum merata pada seluruh SDM;
3. Topologi jaringan telah diperkuat dan *server* internal telah dikelola, namun masih terdapat area dengan kualitas jaringan yang kurang optimal dan standar keamanan ruang server belum sepenuhnya terpenuhi.
4. Telah digunakan berbagai aplikasi pusat dan dikembangkan beberapa aplikasi mandiri;
5. Telah dilakukan screening terhadap perangkat BMN maupun pribadi dan pemantauan keamanan informasi, namun ditemukan beberapa perangkat terindikasi dan penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi;
6. Layanan *Helpdesk* telah tersedia namun masih dilakukan secara konvensional melalui tatap muka.

B. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah terselenggaranya SPBE yang terintegrasi, aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, yaitu:

1. Seluruh pengelolaan aplikasi serta layanan SPBE dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan dipatuhi secara konsisten.
2. Tersedianya SDM SPBE yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas, serta adanya penambahan SDM;
3. Infrastruktur SPBE yang andal dengan jaringan yang stabil di seluruh area kerja serta ruang server yang memenuhi standar keamanan, sarana, prasarana, dan pengendalian akses.
4. Aplikasi pusat dan aplikasi mandiri dikembangkan secara selaras dengan kebijakan dan arsitektur SPBE serta dapat terintegrasi dan mendukung pertukaran data secara optimal.
5. Seluruh perangkat kerja menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi serta terlindungi dari ancaman keamanan informasi melalui pengamanan dan monitoring secara berkala.
6. Layanan *Helpdesk* SPBE tersedia secara daring sehingga permintaan bantuan dapat disampaikan, dipantau, dan diselesaikan tanpa harus datang secara langsung.

C. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Berdasarkan Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan dalam implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat sampai dengan saat ini, disampaikan hasil analisis kesenjangan (*gap analysis*) pada tabel berikut,

Tabel 3.1 Tabel Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Implementasi SPBE

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN
1	SOP terkait SPBE telah tersedia untuk sejumlah layanan dan pengelolaan TIK, namun kepatuhan terhadap SOP belum sepenuhnya optimal;	Seluruh pengelolaan aplikasi serta layanan SPBE dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan dipatuhi secara konsisten.	– Masih terdapat pengembangan aplikasi yang belum sepenuhnya mengikuti SOP – Pemahaman dan kepatuhan terhadap SOP belum merata – Pengawasan terhadap penerapan SOP masih perlu diperkuat
2	Tersedia Tim TI yang terdiri atas 5 Pranata Komputer dan 1 Pengolah Data dan Informasi, namun kompetensi SPBE belum merata pada seluruh SDM;	Tersedianya SDM SPBE yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tugas, serta adanya penambahan SDM;	– Kompetensi masih belum merata – Program pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan – Ketergantungan pada SDM tertentu masih berpotensi terjadi
3	Topologi jaringan telah diperkuat dan <i>server</i> internal telah dikelola, namun masih terdapat area dengan kualitas jaringan yang kurang optimal dan standar keamanan ruang server belum sepenuhnya terpenuhi.	Infrastruktur SPBE yang andal dengan jaringan yang stabil di seluruh area kerja serta ruang server yang memenuhi standar keamanan, sarana, prasarana, dan pengendalian akses.	– Masih terdapat beberapa ruangan dengan jaringan internet yang lambat – Cakupan dan kapasitas jaringan masih perlu ditingkatkan – Standardisasi ruang server belum optimal – Pengendalian akses dan aspek keamanan ruang server masih perlu diperkuat
4	Telah digunakan berbagai aplikasi pusat dan dikembangkan beberapa aplikasi mandiri;	Aplikasi pusat dan aplikasi mandiri dikembangkan secara selaras dengan kebijakan dan arsitektur SPBE serta dapat terintegrasi dan mendukung pertukaran data secara optimal.	– Belum seluruh aplikasi mandiri terintegrasi dengan sistem pusat – Pengembangan aplikasi perlu semakin memperhatikan SOP dan keamanan

NO	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	ANALISIS KESENJANGAN
5	Telah dilakukan screening terhadap perangkat BMN maupun pribadi dan pemantauan keamanan informasi, namun ditemukan beberapa perangkat terindikasi dan penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi;	Seluruh perangkat kerja menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi serta terlindungi dari ancaman keamanan informasi melalui pengamanan dan monitoring secara berkala.	– Masih terdapat penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi – Risiko keamanan dan kepatuhan masih terdapat pada perangkat pegawai – Monitoring keamanan perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
6	Layanan <i>Helpdesk</i> telah tersedia namun masih dilakukan secara konvensional melalui tatap muka.	Layanan Helpdesk SPBE tersedia secara daring sehingga permintaan bantuan dapat disampaikan, dipantau, dan diselesaikan tanpa harus datang secara langsung.	– Telah tersedia rencana penerapan mekanisme Helpdesk digital yang terstruktur – Pemantauan status penyelesaian permintaan masih terbatas

BAB IV KESIMPULAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah berjalan dan memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan tugas serta layanan organisasi, tetapi tingkat kematangan implementasinya masih perlu diperkuat pada beberapa area.

Kekuatan utama terletak pada tersedianya SOP teknis, keberadaan Tim TI, penguatan infrastruktur, pemanfaatan aplikasi pusat dan pengembangan aplikasi mandiri, serta skrining aset terkait deteksi keamanan perangkat. Sementara itu masih diperlukan peningkatan pada kepatuhan SOP beserta pengawasannya, pengembang kompetensi SDM TI secara merata, standar keamanan ruang *server*, dan penggunaan aplikasi atau *software* berlisensi resmi.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan penguatan implementasi SPBE agar penyelenggaraannya semakin efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan evaluasi implementasi SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, berikut rekomendasi dan tindak lanjut yang dihasilkan:

Tabel 5.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SPBE

NO.	RENCANA TINDAKAN	OUTPUT	WAKTU	PIC
1	Melakukan sosialisasi dan penyederhanaan SOP, meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memastikan setiap pengembangan dan pengelolaan aplikasi dilaksanakan sesuai SOP dan ketentuan keamanan yang berlaku	– SOP SPBE yang telah disosialisasikan dan dipahami oleh pegawai terkait – Laporan monitoring dan evaluasi kepatuhan SOP – Dokumentasi penerapan SOP pada pengembangan/pengelolaan aplikasi	TW III 2026	Timja TI
2	Melaksanakan internalisasi, bimbingan teknis, pelatihan, sertifikasi, dan <i>knowledge sharing</i> terkait SPBE, keamanan informasi, aplikasi, data, infrastruktur, dan layanan digital bagi SDM	– Mengikuti pelatihan/bimtek SPBE – Peningkatan kompetensi SDM pengelola SPBE – Dokumentasi <i>knowledge sharing</i>	Agustus 2026	Timja TI
3	Melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas jaringan, penambahan <i>access point</i> pada area yang kurang terjangkau, koordinasi dengan Pusdatin, serta menyusun dan menerapkan standar ruang <i>server</i> yang mencakup aspek keamanan, kelistrikan, jaringan, lingkungan, dan pengendalian akses	– Hasil evaluasi jaringan – Peningkatan cakupan dan kualitas jaringan – Penambahan access point pada area prioritas Standar ruang server – Ruang server yang memenuhi standar keamanan dan pengendalian akses	TW I 2027	Timja TI
4	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aplikasi, memastikan kesesuaian pengembangan dengan Arsitektur SPBE dan SOP, melaksanakan pengujian keamanan, serta mengidentifikasi kebutuhan integrasi, interoperabilitas, dan pertukaran data antar aplikasi	– Dokumen inventarisasi dan pemetaan aplikasi SPBE – Dokumen evaluasi kesesuaian aplikasi dengan Arsitektur SPBE – Peta kebutuhan integrasi/interoperabilitas – Aplikasi yang telah diuji aspek keamanan dan integrasinya	TW I 2027	Timja TI
5	Melakukan migrasi atau pengadaan lisensi resmi perangkat lunak, melakukan <i>screening</i> perangkat secara berkala, meningkatkan <i>digital security awareness</i> , serta	– Seluruh perangkat menggunakan perangkat lunak legal/berlisensi – Laporan hasil <i>screening</i> perangkat	Bertahap sepanjang Tahun 2027	Timja TI

NO.	RENCANA TINDAKAN	OUTPUT	WAKTU	PIC
	melaksanakan penanganan insiden dan monitoring keamanan perangkat secara rutin	– Laporan monitoring keamanan informasi – Terselenggaranya sosialisasi <i>digital security awareness</i>		
6	Mengembangkan layanan Helpdesk secara daring, monitoring status penyelesaian, eskalasi permasalahan, serta dokumentasi riwayat layanan.	– Tersedianya aplikasi/platform <i>Helpdesk</i> SPBE – Dashboard/status monitoring penyelesaian layanan – Rekapitulasi dan dokumentasi riwayat layanan	TW IV 2026	Timja TI

BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ini disusun sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta tindak lanjut peningkatan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, serta sebagai bagian dari penyelesaian tugas dalam pelaksanaan Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026.

LAMPIRAN



Gambar 1. Rapat Tim Kerta Teknologi dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum



Gambar 2. Pegawai Tim Kerja Teknologi dan Informasi mengikuti Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2026



Gambar 3. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (I)



Gambar 4. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (II)



Gambar 5. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (III)



Gambar 6. Maintenance Server Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (IV)



Gambar 7. Skrining Perangkat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
(I)



Gambar 8. Skrining Perangkat Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
(II)